

PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Muthya Manda Yenny, 1420112048, Fakultas Hukum Program Pascasarjana
Universitas Andalas Padang, Magister Ilmu Hukum, Halaman 131, 2016)

ABSTRAK

Koordinasi dan supervisi merupakan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan ini agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif, efisien, dan sinergis. Namun, dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terdapat persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut diantaranya, miskomunikasi antar lembaga penegak hukum. Permasalahan yang dibahas adalah: a) apa bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? b) apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? c) serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah *juridis sosiologis*. Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan KPK, dari tahun 2011 hingga 2015 bentuk koordinasi yang dilakukan diantaranya mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan permintaan informasi oleh KPK terkait dengan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan bentuk tugas supervisi KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam bentuk ekspose bersama, penelaahan, dan pengawasan penyidikan dan penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terdapat beberapa kendala antara lain, egosentris kelembagaan aparat penegak hukum, inisiatif kejaksaan untuk berkoordinasi dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi masih rendah. Upaya KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi antara lain, koordinasi dilakukan secara terpadu melibatkan unsur Kejaksaan Agung dan Kepolisian, meningkatkan peran aktif dalam kegiatan, merancang sistem laporan SPDP dengan memanfaatkan teknologi, MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK. Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum dilaksanakan maksimal oleh KPK sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, maka KPK perlu mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kata kunci: Koordinasi, Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

THE IMPLEMENTATION OF COORDINATION AND SUPERVISION TASKS
BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
ON THE CORRUPTION IN HIGH COURT OF WEST SUMATRA
IN EFFORT TO ERADICATE CORRUPTION

(Muthya Manda Yenny, 1420112048, Faculty of Law Graduate Program, University of Andalas Padang, Master of Law, page 131, 2016)

ABSTRACT

Coordination and supervision are the tasks assigned by law to the Corruption Eradication Commission (Indonesian: *Komisi Pemberantasan Korupsi*, abbreviated as KPK). This commission was established in order to fight corruption more effectively, efficiently, and synergistically. However, there are several issues in the implementation of the tasks, including the miscommunication between the law enforcement agencies. The problems discussed in the research are: a) what is the implementation of the coordination and supervision tasks by KPK in High Court of West Sumatra? b) What obstacles are encountered in the implementation of the coordination and supervision tasks by KPK and High Court of West Sumatra? c) What efforts have been done to overcome those obstacles? The research used juridical sociology method. The result shows from 2011 to 2015 the coordination task which has been done was coordinating the investigation conducted by the Attorney and information request by KPK related to corruption eradication activities. The supervision tasks of KPK in the High Court of West Sumatra were joint exposure, analysis, and investigation and prosecution monitoring. In implementing its tasks, there are several obstacles, including the egocentrism of law enforcement institution, the prosecutor's initiative to coordinate the activities of eradicating corruption is still low. The efforts of KPK and High Court of West Sumatra in overcoming those obstacles are an integrated coordination involving the Attorney General and the Police, encouraging an active role in the activities, designing a technology-based SPDP reporting system, MoU with the Prosecutor and the Police, and facilitating the coordination and supervision tasks carried out by KPK. The implementation of coordination and supervision tasks by KPK in High Court of West Sumatra have not been implemented up optimally. Therefore, to optimize the eradication of corruption in West Sumatra, KPK need to optimize the coordination and supervision tasks with High Court of West Sumatra.

Keywords: Coordination, Supervision, Corruption Eradication Commission, and High Court of West Sumatra.